

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada 2018, dengan wilayah seluas 5.180.053 km<sup>2</sup>, Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai 1.922.570 km<sup>2</sup> daratan dan 3.257.483 km<sup>2</sup> lautan serta pulau yang berjumlah 16.056 (www.kompas.com). Keberagaman bentuk bumi yang terdiri dari pantai, pegunungan, gunung, bukit dan keberagaman lainnya, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang begitu kaya dengan sumber daya alamnya. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia yang berada di pertemuan Lempeng Pasifik, Eurasia, dan Indo-Australia. Pertemuan tiga lempeng itu juga yang membentuk rangkaian pegunungan menjadi gunung berapi dan juga menjadi penyebab peristiwa alam seperti gempa bumi dan tsunami terjadi di Indonesia.

Dengan bentuk kondisi bumi Indonesia yang beragam dapat menghambat mobilitas masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi bahkan kondisi fisik wilayah yang ekstrim dapat menyebabkan wilayah tersebut terisolir karena sulit untuk dijangkau, apabila tidak ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai akan mempengaruhi aksesibilitas suatu wilayah. Aksesibilitas merupakan suatu keadaan atau kemampuan suatu wilayah bisa diakses oleh pihak luar secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal tersebut menjadikan infrastruktur penghubung satu wilayah dengan wilayah lain jadi hal penting untuk interaksi dan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu dari lima visi Indonesia. Mengoneksikan daerah produksi dengan daerah distribusi, kemudian memudahkan jangkauan menuju destinasi wisata, dan mendukung terciptanya lapangan kerja baru serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan infrastruktur tersebut. Anggaran infrastruktur jadi salah satu fokus belanja pemerintah pusat dalam APBN 2020 dengan anggaran sebesar 423,3 triliun rupiah yang kemudian akan dialokasikan melalui belanja pusat sebesar

191,2 triliun rupiah, transfer ke daerah sebesar 200,3 triliun dan pembiayaan sebesar 31,8 triliun rupiah (Kemenkeu, 2020). Dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur dapat memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah sehingga pemerataan pembangunan wilayah dapat tercapai.

Pembangunan infrastruktur harus terus dilakukan seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang artinya meningkat pula kebutuhan terhadap sarana dan prasarana fisik. Pada tahun 2020 hasil sensus mencatat penduduk Indonesia September 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa. Pada kurun waktu 2010 – 2020 laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,25 % ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dari jumlah keseluruhan penduduk sebagian besar masih bertempat tinggal di pedesaan sehingga perlu terus dilakukannya pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Infrastruktur yang meliputi sarana serta prasarana fisik di wilayah desa khususnya infrastruktur yang menunjang aksesibilitas desa tersebut merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang di prioritaskan dalam pembangunan desa. Karena dengan adanya infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat bisa mendukung kegiatan ekonomi masyarakat serta membangkitkan kualitas hidup masyarakat di desa sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak desa yang terkendala dalam pembangunan infrastruktur, sehingga kebutuhan masyarakat desa akan infrastruktur belum terpenuhi.

Terkendalanya pembangunan infrastruktur desa bisa terjadi karena dari segi dana yang tidak memenuhi dan tidak efektifnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Partisipasi masyarakat pada proses pembangunan infrastruktur desa menjadi pilihan solusi untuk mengatasi hambatan pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 83 Ayat 2 yang berisi bahwa, pembangunan kawasan

perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur desa yakni suatu proses keikutsertaan sekelompok orang secara aktif dalam setiap upaya/kegiatan untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan dan terencana untuk membawa perubahan yang lebih baik yang didukung oleh sarana fisik agar tercapainya target yang sudah ditentukan. Mustanir, Barisan, & Hamid, (2017) dalam Latif, dkk, (2019). Pelibatan masyarakat pada proses pembangunan menjadikan pembangunan menjadi optimal karena pembangunan tersebut akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, akibatnya akan tumbuh rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun.

Desa Cisempur dan Desa Mandalahurip merupakan desa yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Sarana dan prasarana infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Desa Cisempur Kecamatan Cibalong yang dilewati oleh Sungai Ciwulan memisahkan dengan Desa Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, sehingga infrastruktur seperti jembatan menjadi sesuatu yang penting dan harus ada agar dapat menunjang aktivitas masyarakat desa dan meningkatkan aksesibilitas Desa Cisempur dan Desa Mandalahurip.

Belum cukupnya jembatan penghubung ke dua desa mengharuskan sebagian masyarakat menggunakan rakit untuk menyebrangi sungai tersebut. Meskipun penggunaan rakit saat ini masih dianggap efektif, namun juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Maka dari itu pembangunan jembatan gantung untuk menghubungkan kedua desa ini dirasa penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi risiko terseret arus sungai. Hal ini terjadi karena masih kurangnya perhatian pemerintah setempat karena terkendala dana dan kurangnya pelibatan masyarakat pada pembangunan desa. Melibatkan masyarakat pada proses pembangunan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang efektif, karena akan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan mereka rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun. Faktor-faktor tersebut menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan

penelitian berjudul "HUBUNGAN ANTARA KEBUTUHAN SARANA TRANSPORTASI DENGAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Pada latar belakang masalah, bisa ditarik kesimpulan mengenai identifikasi masalah diantaranya:

- 1) Terdapat masalah aksesibilitas Desa Cisempur di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang disebabkan oleh adanya Sungai Ciwulan yang memisahkan desa tersebut dengan Desa Mandalahurip di Kecamatan Jatiwaras.
- 2) Sebelum adanya pembangunan jembatan gantung penghubung ke dua desa, sebagian penduduk desa menggunakan rakit untuk menyeberangi Sungai Ciwulan. Metode ini memiliki risiko yang tinggi dan kurang efisien.
- 3) Pembangunan jembatan gantung di Desa Cisempur dan Desa Mandalahurip dilakukan oleh Vertical Rescue Indonesia dengan bantuan masyarakat desa melalui kerjasama gotong royong.
- 4) Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan jembatan gantung dengan bentuk partisipasi yang beragam.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan masalah yakni, adakah hubungan antara kebutuhan sarana transportasi dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan jembatan gantung di Desa Cisempur Kecamatan Cibalong dan Desa Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya?.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan menganalisis hubungan antara kebutuhan sarana transportasi dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan jembatan gantung di Desa Cisempur Kecamatan Cibalong dan Desa Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Secara umum, hasil penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat dan pengetahuan untuk peneliti, pembaca, serta masyarakat luas mengenai hubungan antara kebutuhan sarana transportasi dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pembangunan jembatan gantung di Desa Cisempur Kecamatan Cibalong dan Desa Mandalahurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini juga secara khusus memberikan kebermanfaatan dalam beberapa hal:

### 1) Kegunaan Teoritis

- a) Harapannya penelitian ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan pentingnya sarana transportasi yang memadai dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan.
- b) Berkontribusi atau memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi jurusan Pendidikan Masyarakat yang peduli terhadap penggalian kemampuan serta meningkatkan motivasi berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang di adakan oleh pemerintah daerah ataupun pihak lain.
- c) Hasil dari penelitian harapannya bisa menjadi referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa atau melanjutkan studi lebih lanjut dalam mengembangkan bidang penelitian terkait.

### 2) Kegunaan Praktis

- a) Bagi Masyarakat Desa Cisempur dan Desa Mandalahurip  
Menjadi masukan positif pada masyarakat Desa Cisempur dan Desa Mandalahurip agar terus bisa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan guna peningkatan infrastruktur daerah.
- b) Bagi Kelembagaan  
Menjadi panduan serta referensi untuk instansi dan pihak terkait dalam merancang dan menyempurnakan program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Terutama bagi Pemerintah Desa Cisempur di Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Desa Mandalahurip di Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, dan Vertical Rescue Indonesia. Hasil penelitian ini dapat membantu dalam

mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta merancang kebijakan yang lebih efektif untuk pembangunan infrastruktur desa.

c) Bagi Peneliti

Memberi pengalaman dan pemahaman yang baru mengenai partisipasi masyarakat dalam suatu program serta hubungannya dengan kebutuhan sarana transportasi, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan jembatan gantung.

### **1.6 Definisi Operasional**

Pada penelitian ini, beberapa istilah atau variabel perlu dideskripsikan secara operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran. Berikut adalah definisi operasional yang dijelaskan:

1) Kebutuhan Sarana Transportasi

Kebutuhan dalam penelitian ini maksudnya yaitu segala sesuatu yang berusaha manusia dapatkan. Pada penelitian ini kebutuhan tersebut adalah sarana transportasi yaitu jembatan gantung penghubung Desa Cisempur Kecamatan Cibalong dan Desa Mandalaurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

2) Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keikutsertaan masyarakat pada pembangunan jembatan gantung penghubung Desa Cisempur Kecamatan Cibalong dan Desa Mandalaurip Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Partisipasi masyarakat tersebut baik saat perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan serta evaluasi kegiatan. Dengan berbagai macam cara berpartisipasi baik menyumbangkan ide dan pendapat, sumbangan materi, tenaga, keahlian maupun keterampilan. Dengan didasari oleh kesadaran diri sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan.